

Analisis Pengaruh Aglomerasi, Infrastruktur, Upah Minimum, Jumlah Orang Bekerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Jawa Timur

Alifia Nadia Tsamara¹, Agus Suman²

1. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Indonesia
 2. Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Indonesia
- E-mail: alifiatsamara34@gmail.com, agusuman@ub.ac.id

Abstrak

Ketimpangan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan yang terus meningkat tiap tahunnya hingga menyamai ketimpangan nasional pada 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur serta faktor yang diduga mempengaruhi fluktuasinya. Penelitian dilakukan dengan data 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada periode 2010 hingga 2015 menggunakan analisis indeks entropi theil dan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan adanya tren meningkat pada ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur. Adapun faktor yang berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi ketimpangan adalah aglomerasi, jumlah orang bekerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel Infrastruktur dan upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Keywords: Ketimpangan, Indeks Entropi Theil, Jawa Timur

JEL Classification:

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang dibuktikan dari rendahnya PDRB perkapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti negara G20. Sebagai negara berkembang Indonesia tidak dapat lepas dari masalah yang umum dihadapi negara berkembang lainnya yaitu ketimpangan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan pendapatan antar wilayah yang mencolok. Hal ini menimbulkan polaritas antar wilayah akibat hasil dari output yang dimonopoli dan hanya dinikmati oleh segelintir orang (Musfidar, 20012).

Upaya untuk mengatasi masalah ini salah satunya adalah dengan me-

ingkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang diharapkan dapat menjadi jembatan terwujudnya pemerataan pendapatan. Dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi berdampak pada perbaikan di berbagai aspek. Peningkatan aktivitas ekonomi wilayah, hal ini memicu industri untuk berkelompok di suatu wilayah atau yang biasa dikenal sebagai aglomerasi. Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri memiliki tingkat aglomerasi tertinggi yang terus bersaing dengan Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan aglomerasi industri wilayah sehingga kebutuhan akan infrastruktur semakin meningkat.

Infrastruktur berperan sebagai akselerator perekonomian dengan memudahkan proses produksi, distribusi

dan pemasaran dapat meningkatkan produktivitas wilayah. Jalan merupakan infrastruktur yang berperan penting pada proses ini. Kondisi jalan berkualitas baik dan sedang di Jawa Timur sendiri terus meningkat pada periode 2010-2015. Kemudahan pada aktivitas ekonomi ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga melalui upah minimum.

Tingkat upah minimum yang berbeda pada tiap wilayah menjadi peluang bagi tenaga kerja untuk meningkatkan taraf hidup. Pemerintah Jawa Timur tiap tahunnya telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan terus melakukan peningkatan upah minimum hingga mencapai Rp. 1.547.000 pada 2015. Peningkatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi tenaga kerja, sehingga wilayah dengan tingkat upah tinggi berpotensi untuk menarik lebih banyak tenaga kerja dari wilayah sekitarnya.

Jumlah orang bekerja di Jawa Timur terus mengalami perbaikan, meski sempat turun menjadi 18.605 ribu jiwa pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan dan sebaran tenaga kerja berpendapatan layak berdampak pada meningkatnya kualitas penduduk wilayah yang digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memroyeksikan kondisi penduduk wilayah berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. IPM Jawa Timur sendiri terus mengalami perbaikan tiap tahunnya hingga mencapai 68.95% pada 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk wilayah berjalan seiringan dengan perbaikan pendapatan dan perekonomian suatu wilayah (Islami dan Nugroho, 2013).

Namun, meski berbagai aspek mengalami perbaikan tingkat ketimpangan intra Jawa Timur yang digambarkan oleh indeks Gini terus meng-

alami peningkatan tiap tahunnya hingga menyamai tingkat ketimpangan nasional pada 2015.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur. Serta menganalisis pengaruh aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Hipotesis Ketimpangan Neo-Klasik

Hipotesis ini dipelopori oleh Douglass C. North dalam studinya mengenai pertumbuhan ekonomi neo-klasik. North menemukan adanya korelasi antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah di suatu negara, dimana pada tahap awal pembangunan negara akan mengalami peningkatan ketimpangan antar wilayah yang terus berlanjut hingga sampai titik puncaknya. Jika pembangunan masih berlangsung maka ketimpangan akan menurun, yang pada akhirnya membentuk kurva “U-Terbalik”.

Williamson (1965) menguji kebasahan dari teori ini dalam penelitiannya terhadap kesenjangan pembangunan wilayah beberapa negara maju dan negara berkembang. Hasilnya menjelaskan bahwa hipotesis Neo-Klasik secara empirik dapat dibuktikan kebenarannya, atau dapat dimengerti dengan proses pembangunan tidak serta merta menghentikan ketimpangan justru pada mulanya akan memicu naiknya tingkat ketimpangan (Sjafrizal, 2012).

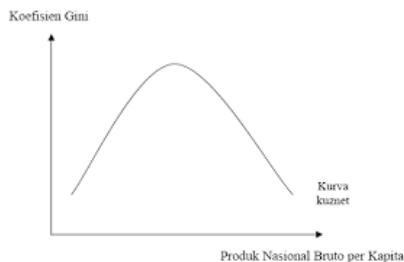
Hipotesis Kuznets

Dugaan adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan dipopulerkan oleh seorang ekonom klasik Simon Kuznets (1955) dalam penelitiannya

terhadap kesenjangan di beberapa negara. Pada studinya Kuznets mengemukakan hipotesis yang menyatakan ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung umum terjadi pada masa perintisan ekonomi. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai “Hipotesis Kuznets”

Kuznets menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi “Kurva U-Terbalik”

Gambar 1. Kurva U-Terbalik



Sumber: Todaro, 2011

Kuznet menyatakan jika pada permulaan pertumbuhan ekonomi peningkatan pendapatan perkapita akan searah dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Keadaan ini akan terus berlanjut hingga keduanya mencapai titik puncak. Hingga jika pertumbuhan terus berlanjut ketimpangan perlahan akan menurun dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Secara singkat dapat dimengerti bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak dapat langsung menyelesaikan masalah ketimpangan, justru akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, dalam jangka panjang jika pertumbuhan ekonomi terus terjadi distribusi pendapatan semakin merata (Todaro, 2004).

Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan dalam distribusi pendapatan dari perekonomian yang berbasis pedesaan atau pertanian menjadi perekonomian berbasis kota atau industri. Pada tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan meningkat sebagai dampak dari urbanisasi dan industrialisasi. Kemudian pada ta-

hap selanjutnya, sektor industri akan mengalami pembangunan dan perluasan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari sektor pertanian pedesaan dan distribusi pendapatan mulai merata.

Dengan struktur perekonomian pada tahap awal pertumbuhan yang berpusat pada industri modern berakibat pada semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, dilain sisi pemusatan ini justru meningkatkan produktivitas dan tingkat upah di sektor industri. Hal ini menyebabkan sektor industri modern berkembang dengan pesat dan meninggalkan sektor pertanian tradisional yang cenderung stagnan. Perbedaan kecepatan ini membuat ketimpangan antara sektor industri dan pertanian semakin tinggi. Namun, pada saat perekonomian telah mencapai puncaknya kesenjangan ini akan menurun secara alami.

Dalam penelitiannya Kuznets mengasumsikan jika dibandingkan dengan kelompok yang berpenghasilan rendah, kelompok dengan pendapatan tinggi memiliki kontribusi yang lebih besar pada modal dan tabungan. Fenomena ini membuat terjadinya pemusatan modal pada kelompok dengan pendapatan tinggi yang terjadi secara terus menerus (akumulatif) sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu negara.

Teori Ketimpangan Myrdal

Myrdal (1957) menjelaskan proses terjadinya ketimpangan dengan menggunakan *spread effects* (dampak sebar) dan *backwash effects* (dampak pengurasan) dari pembangunan yang terpusat. *Spread effects* dapat diartikan sebagai penyebaran dampak positif dari pembangunan pusat perekonomian. Sedangkan *backwash effects* merupakan dampak negatif pembangunan dengan semakin berkurangnya modal dan tenaga kerja yang berada di wilayah sekitar pembangunan.

Backwash effects yang disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi di wilayah maju akan menarik tenaga kerja produktif dari wilayah sekitarnya dan meyebakan produktivitas wilayah meningkatnya. Akibatnya semakin banyak investasi yang ditujukan pada daerah maju dan kesejahteraan penduduk meningkat. Perbedaan yang mencolok antara daerah maju dan daerah terbelakang ini meningkatkan ketimpangan antar wilayah.

Sebaliknya, *spread effects* memberikan keuntungan pada wilayah-wilayah sekitar wilayah maju melalui peningkatan permintaan barang mentah sebagai faktor produksi yang dibutuhkan oleh industri di wilayah maju. Dengan meningkatnya kebutuhan industri maka daerah terbelakang secara perlahan dapat meningkatkan kualitas wilayahnya melalui aliran investasi dari pusat pertumbuhan yang ditujukan untuk wilayah sekitar.

Menurut Myrdal (1957) pada negara berkembang, perbedaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi antara wilayah perkotaan modern dan pedesaan tradisional yang terlalu tinggi akan mengantarkan pada *backwash effect* yang lebih kuat dari *spread effect*. Dalam jangka panjang *backwash effect* akan semakin menutupi *spread effect* dan menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan ini akan menjadikan wilayah maju sebagai magnet pembangunan dan menyebabkan wilayah terbelakang semakin kehilangan sumber dayanya (Jhingan, 2010). Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kekuatan segelintir pelaku ekonomi sehingga pasar termonopoli dan memicu terjadinya ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskripsi menggunakan teknik analisis indeks entropi

theil untuk menggambarkan kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota, serta regresi data panel untuk mengetahui kontribusi tiap variabel terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa timur. Dengan data sekunder 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada periode 2010 hingga 2015.

Indeks Entropi Theil

Indeks entropi theil merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan aplikasi teori ekonomi dengan membandingkan pendapatan kotor pada lingkup antar dan intra wilayah (Sjafrizal, 2012). Adapun formula dari indeks entropi theil adalah:

$$T_d = (y_{ij}/Y) \log[(y_{ij}/Y)/n_{ij}/N]$$

Dengan:

T_d : Indeks entropi theil

y_{ij} : PDRB per-kapita kabupaten/kota

Y : PDR per-kapita Jawa Timur

n_{ij} : Jumlah penduduk kabupaten/kota

N : Jumlah penduduk Jawa Timur

Regresi Data Panel

Analisis data panel dilakukan dengan meregresi kombinasi data *cross section* dan *time series* untuk mengetahui pengaruh sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Secara matematis persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$\begin{aligned} Theil_{it} = & \beta_0 + \beta_1 AGL_{it} \\ & + \beta_2 LnINFRA_{it} \\ & + \beta_3 LnUM_{it} \\ & + \beta_4 LNJOB_{it} \\ & + \beta_5 IPM_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Dengan:

Theil : Ketimpangan distribusi pendapatan

AGL : Aglomerasi industri

LnINFRA: Infrastruktur

LnUM : Upah minimum

LNJOB : Jumlah orang bekerja

IPM : Indeks pembangunan

manusia
 ε : Error
i : Wilayah
t : Periode

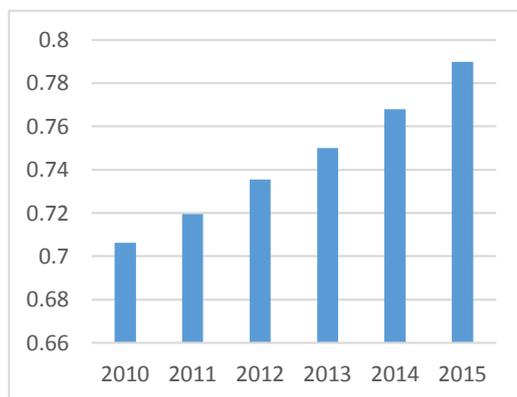
4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Jawa Timur

Ketimpangan merupakan salah satu momok dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ketimpangan intra wilayah yang digambarkan oleh indeks gini pada periode 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Meski ketimpangan secara keseluruhan meningkat kondisi pada level antar wilayah tidak dapat digambarkan oleh indeks gini.

Pada penelitian ini untuk memperjelas kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota Jawa Timur digunakan ukuran indeks entropi theil yang memperhitungkan perbedaan baik intra maupun antar wilayah dengan memanfaatkan sistem informasi.

Gambar 2. Indeks Entropi Theil Jawa Timur Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah).

Gambar 2 menunjukkan hasil yang serupa dengan indeks gini Jawa Timur. Indeks entropi theil menunjukkan Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota yang cukup tinggi dengan tren yang terus meningkat tiap tahunnya pada periode 2010-2015.

Lebih jauh lagi pada level kabupaten/kota tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada wilayah berbasis industri, seperti Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Sedangkan tingkat ketimpangan terendah terjadi pada wilayah berbasis pertanian seperti Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ponorogo.

Terdapat fenomena menarik terjadi pada wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi. Dua dari wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi merupakan bagian dari Gerbang Kertosusilo (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan) yang merupakan kawasan metropolitan di Jawa Timur dan bertujuan untuk mewujudkan pengurangan ketimpangan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah. Perbedaan tingkat ketimpangan yang mencolok juga terjadi pada Kota Kediri dan Kabupaten Kediri yang berada dalam satu kawasan.

Kota dan Kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang tinggi merupakan kota yang perekonomiannya disokong oleh sektor manufaktur dan merupakan wilayah yang strategis yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Kontribusi sektor manufaktur di ketiga kota ini tergolong sangat tinggi dengan Kota Kediri sebesar 81.93%, Kota Surabaya sebesar 19.23%, dan Kabupaten Gresik 49.22% pada 2015.

Analisis Data

Uji asumsi klasik penting dilakukan sebelum menganalisis data menggunakan regresi data panel. Meski data panel memiliki beberapa kelebihan yang tidak mengharuskan dilakukannya uji asumsi klasik, uji ini tetap dilakukan untuk memastikan kesesuaian data. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji

heteroskedastitas. Hasil dari uji ini tidak menunjukkan adanya gejala penyimpangan asumsi klasik pada variabel aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM sehingga dapat dilakukan analisis regresi data panel.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y_KETIMPANGAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 06/17/21 Time: 19:46
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 228
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.792622	0.390867	9.703099	0.0000
X1_AGL	8.167940	2.052306	3.979884	0.0001
LN _{X2} _INFRA	0.006870	0.006686	1.027498	0.3055
LN _{X3} _UM	0.023986	0.014090	1.702395	0.0904
LN _{X4} _JOB	-0.158045	0.030330	-5.210826	0.0000
X5_IPM	-0.005877	0.002672	-2.199865	0.0291

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.999631	Mean dependent var	3.836120
Adjusted R-squared	0.999547	S.D. dependent var	2.825748
S.E. of regression	0.061543	Sum squared resid	0.700700
F-statistic	11931.84	Durbin-Watson stat	1.227378
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.999715	Mean dependent var	1.950251
Sum squared resid	0.959607	Durbin-Watson stat	1.528961

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis regresi data panel yang dapat dituliskan menjadi:

$$\begin{aligned}
 Y_{Ketimpangan} = & 3.792622 + 8.167940_{AGL} \\
 & + 0.006870_{LnINFRA} \\
 & + 0.023986_{LnUM} \\
 & - 0.158045_{LnJOB} \\
 & - 0.005877_{IPM}
 \end{aligned}$$

Koefisien determinasi (R^2) me-

nunjukkan nilai 0.9996 atau 99.96% yang berarti bahwa variabel aglomerasi, infrastruktur, upah minimum, jumlah orang bekerja, dan IPM mampu menjelaskan variabel ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 99.96% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel luar yang tidak tercantum dalam model penelitian.

Pengaruh simultan variabel independen yang digambarkan oleh nilai Prob.(F-Statistic) menunjukkan nilai 0.000 yang berarti secara simultan variabel independen berkontribusi signifikan terhadap perubahan pada variabel dependen.

Secara parsial tiap variabel independen memiliki pengaruh yang bervariasi yang digambarkan oleh nilai Prob.(t-Statistic) dengan: 1) Aglomerasi berpengaruh signifikan; 2) Infrastruktur berpengaruh tidak signifikan; 3) Upah minimum berpengaruh tidak signifikan; 4) Jumlah orang bekerja berpengaruh signifikan; dan 5) IPM berpengaruh signifikan.

Pembahasan

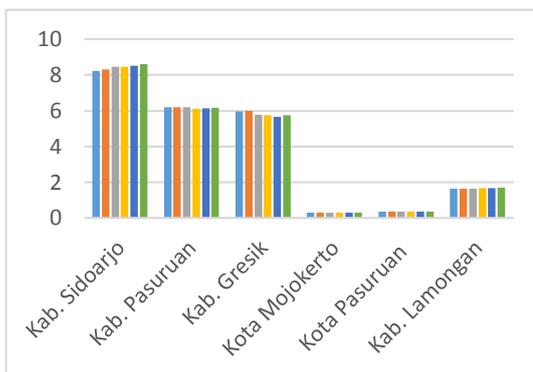
Aglomerasi merupakan fenomena terpusatnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan oleh keinginan pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan berupa penghematan akibat adanya kedekatan spasial antar industri (Kuncoro, 2002). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa aglomerasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap yang cukup besar terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

Aglomerasi dapat berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume kegiatan ekonomi dan percepatan peralihan struktur ekonomi dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern sehingga pemerataan distribusi pendapatan dapat segera terwujud. Sayang-

nya dampak positif dari aglomerasi industri hanya dapat dirasakan pada wilayah pusat ekonomi dan tidak sebaliknya (Sjafrizal, 2008).

Teori Myrdal (1957) menyatakan pemusatan pembangunan dan kegiatan ekonomi jika tidak ditangani dengan benar memicu terjadinya dominasi *backwash effect* yang berdampak pada kemunduran bagi wilayah-wilayah sekitar pusat pertumbuhan. Dampak dari *backwash effects* dapat dilihat melalui perbedaan kontribusi PDRB Kabupaten/Kota yang Jawa Timur.

Gambar 3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3 menunjukkan wilayah yang memiliki kawasan industri memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan wilayah berbasis pertanian. Hal ini terjadi karena Sektor industri perkotaan akan menyerap bahan baku mentah, tenaga kerja, serta modal dari pedesaan sehingga tidak akan ada cukup faktor produksi yang dapat digunakan di wilayah pedesaan, akibatnya ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah maju dan terbelakang akan semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan Yusica, Malik, dan Arifin (2018), Castells-Quintana (2014), dan Kurniawan dan Sugiyanto (2013) yang menyatakan bahwa aglomerasi secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Infrastruktur merupakan sarana

penting yang berfungsi sebagai akselerator perekonomian wilayah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa infrastruktur yang diwakilkan oleh panjang jalan Kabupaten/Kota dengan mutu baik dan sedang memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hasil ini berlawanan dengan hipotesis penelitian sehingga hipotesis tersebut ditolak.

Ketersediaan infrastruktur tidak dapat berpengaruh langsung pada ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, dampak dari infrastruktur terhadap distribusi pendapatan dapat terjadi melalui pendapatan per-kapita. Hipotesis ketimpangan neo-klasik dan kuznets menyatakan pada awal proses pertumbuhan ekonomi pembangunan akan berfokus pada sektor industri. Hal ini membuat wilayah berbasis non industri cenderung memiliki infrastruktur yang kurang memadai dan mengharuskan adanya biaya tambahan produksi untuk menutupi kekurangan tersebut. Pada akhirnya hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat produksi.

Upah minimum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi pendapatan di Jawa Timur sehingga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan menurun. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil regresi ini sejalan dengan hipotesis penelitian.

Struktur tenaga kerja Jawa Timur pada periode 2010-2015 didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang sebagian besar merupakan tenaga kerja lepas dan tidak terikat kontrak

sehingga dampak dari kebijakan upah minimum tidak dapat dirasakan. Kemudian tenaga kerja di sektor non industri harus menerima dampak dari terus meningkatnya harga kebutuhan pokok sehingga tenaga kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Fenomena ini membuat upah minimum yang pada awalnya diharapkan sebagai solusi menjadi salah satu penyebab dari ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan Noto (2016), Sungkar (2015), dan Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Jumlah orang yang bekerja merupakan gambaran riil kondisi tenaga kerja produktif yang ada di lapangan dan berkontribusi langsung dalam perekonomian suatu wilayah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah orang bekerja memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hasil ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui ketersediaan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas wilayah sehingga wilayah tertinggal dapat menyusul wilayah maju.

Kuantitas tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan unik tiap wilayah yang dapat menjadi alat pemerata distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena wilayah yang tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan secara perlahan dapat menyusul perekonomian wilayah maju hingga terjadi konvergensi perekonomian. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi pendahulu oleh Kurniawan (2013), dan Sjafrizal (2008)

yang menyatakan peningkatan ketimpangan pendapatan didukung oleh pentapan upah minimum.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat pengukuran kualitas penduduk dengan berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia di Indonesia, yaitu: 1) Aspek kesehatan; 2) Aspek pengetahuan; 3) Aspek kelayakan hidup (Badan Pusat Statistik).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hasil regresi ini berlawanan dengan hipotesis penelitian sehingga hipotesis ditolak.

Berdasarkan teori modal manusia pembangunan kualitas manusia ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki penduduk suatu wilayah agar dapat hidup sejahtera dan keluar dari jurang kemiskinan dan secara global dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Kualitas penduduk utamanya dapat dilihat melalui aspek pendidikan.

Tingkat partisipasi sekolah Jawa Timur yang terus meningkat pada periode 2010-2015. Terpenuhinya pendidikan dasar membuat tenaga kerja memiliki kualifikasi dasar yang baik sehingga membuka kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan terbebas dari jerat kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur yang tetap dapat stabil pada tingkat 4%. IPM dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tenaga kerja antar wilayah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan Nurhuda (2013), dan Oksamulya (2020) yang menyatakan bahwa dampak negatif ditunjukkan pada hubungan Pembangunan Manusia dan ketimpangan distribusi pendapatan.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Indeks entropi theil menunjukkan adanya tren meningkat pada ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur dengan nilai tertinggi pada Kabupaten/Kota berbasis industri.

Tiap variabel memiliki pengaruh berbeda terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan: 1) Aglomerasi: positif signifikan; 2) Infrastruktur: positif tidak signifikan; 3) Upah minimum: positif tidak signifikan; 4) Jumlah orang bekerja: negatif signifikan; 5) Indeks Pembangunan Manusia: negatif signifikan.

Adapun saran dari penelitian ini diantaranya: 1) Perlu dilakukan pemeliharaan dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keunikan geografi tiap wilayah.; 2) Perumusan regulasi upah minimum untuk tenaga kerja diluar sektor-sektor formal; 3) Menggalakkan edukasi pentingnya pendidikan dasar atau peningkatan anggaran subsidi pendidikan; 4) Penggunaan variabel infrastruktur panjang jalan dapat ditambahkan data panjang jalan provinsi dan panjang jalan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. *Jejak: Journal of Economics and Policy*. 6(1), 42-53.

Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Castells, D. d. (2014). Agglomeration, Inequality and Economic Growth. *Springer*.

Gujarati, D. (2016). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta:Erlangga.

Islami, F. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Inonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*. 33(1), 29-39.

Jhingan, M. L. (2010). *The Economics of Development and Planning*. Vinda Publications.

Kuncoro, M. (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kurniawan, B. R. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan PERTanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah antar KAbupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics*. 2(1), 1-14.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*. XIV (1).

Musfidar, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan. *E-Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*.

Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-developed Regions*. London: G. Duckworth & Co. Ltd.

Nurhuda, R. M. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurusan Administrasi Publik*. 1(4), 110-119.

Oksamulya, A. d. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan PEndapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 2 (1), 141-150.

Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sungkar, S. N. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 40-53.

Todaro, M. & Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.

Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and The Process of National Development. *Economic Development and Cultural Change*. 13(4, Part 2), 1-84.

Yusica, I. V. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2, 230-240.